

**KEBIJAKAN AUSTRALIA DALAM MENGATASI *ILLEGAL IMMIGRANT* DI
BAWAH PEMERINTAHAN PM TONY ABBOTT**

Oleh :

Taufik Eko Hidayanto

(arjowinangun@gmail.com)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Yogyakarta 55183

Abstract

This paper describes about Australia's policy to control the illegal immigrants under the government of Prime Minister Tony Abbott. Australia is one of the destination countries for illegal immigrants who escaped from several countries for the purpose to obtaining an asylum. The increased arrivals of illegal immigrants from year to year make impact to sovereignty and security of Australia region. Therefore, it requires the government to be firm in handling it. The policy that is adopted by Prime Minister Tony Abbott to control the arrival of illegal immigrants is Operation Sovereign Borders (OSB) policy. OSB is done by placing Australian military in border area to prevent the arrival of illegal immigrants or asylum seeker by boat.

Keywords: Policy, Illegal Immigrant, Asylum Seeker, Operation Sovereign Borders (OSB)

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang kebijakan Australia dalam mengontrol imigran ilegal di bawah pemerintahan PM Tony Abbott. Australia adalah salah satu negara tujuan para imigran ilegal yang melarikan diri dari negaranya dengan tujuan guna mencari suaka. Peningkatan kedatangan imigran ilegal dari tahun ke tahun berdampak pada kedaulatan dan keamanan kawasan Australia. Maka dari itu, pemerintah harus tegas dalam mengatasi hal tersebut. Kebijakan yang diambil oleh Tony Abbott yaitu Operasi Kedaulatan Perbatasan. Operasi ini dilakukan dengan cara menempatkan militer di area perbatasan guna mencegah kapal para imigran ilegal atau pencari suaka.

Kata kunci : Kebijakan, Imigran Ilegal, Pencari Suaka, Operasi Kedaulatan Perbatasan

PENDAHULUAN

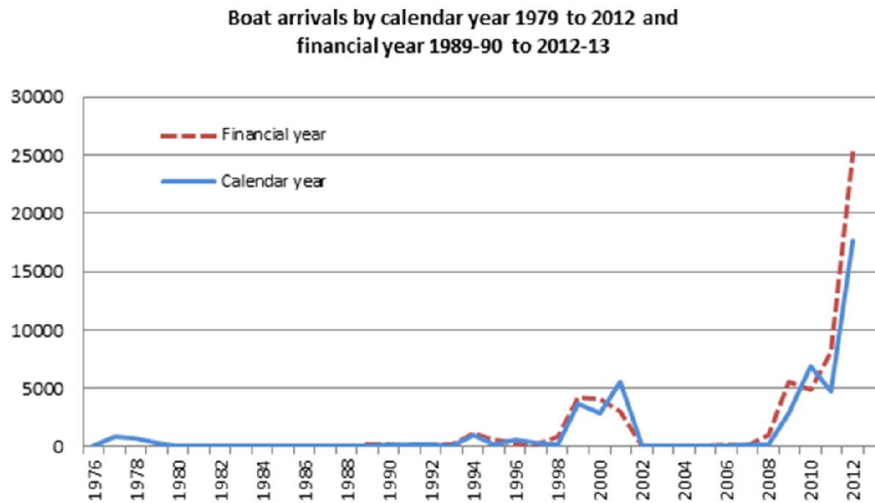
Australia, resminya Persemakmuran Australia, adalah sebuah negara di belahan selatan yang terdiri dari daratan utama benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Sebagai sebuah negara maju yang makmur, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Australia berperingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antarbangsa seperti pembangunan, mutu kehidupan, perawatan kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, kebebasan ekonomi, dan perlindungan kebebasan sipil, dan hak-hak politik (worldaudit.org, 2015). Australia adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, G-20 ekonomi utama, Negara-Negara Persemakmuran, ANZUS, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Forum Kepulauan Pasifik, dan Organisasi Perdagangan Dunia.

Sebagai negara yang stabil secara politik maupun ekonomi, Australia merupakan negara yang banyak dijadikan tujuan oleh para imigran internasional dari berbagai negara. Secara garis besar, terdapat dua gelombang kedatangan para imigran ke Australia, yakni melalui jalur udara dengan menggunakan pesawat dan melalui jalur laut dengan menggunakan perahu. Para imigran yang datang menggunakan perahu kemudian disebut dengan *boat people* atau manusia perahu. Terminologi *boat people* sebenarnya merujuk kepada pencari suaka atau asylum seeker yang datang menggunakan perahu dengan tujuan memperoleh suaka di Australia dan menjadi subjek pemrosesan lepas pantai oleh otoritas Australia di pulau-pulau yang berada di luar teritori negara tersebut.

Pemerintah Australia melalui *Department Immigration and Citizenship* (DIAC) memutuskan bahwa keberadaan pencari suaka yang datang menggunakan perahu tersebut dianggap sebagai imigran ilegal atau *illegal immigrant* (www.immi.gov.au, 2015). Persoalan imigran ilegal yang terus terjadi sangat meresahkan bagi Australia, karena peningkatan terus terjadi dari tahun ke tahun khususnya imigran ilegal atau pencari suaka yang mencoba masuk ke Australia dengan menggunakan perahu.

Berdasarkan data Badan Pengungsi Australia, pada tahun 2004-2005 terdapat 8 perahu dengan 61 imigran. Pada 2008-2009 mulai meningkat menjadi 23 perahu dengan 985 imigran. Pada 2009-2010 ada 117 perahu dengan 4.370 imigran dan 2010-2012 sebanyak 110 perahu dengan 7.983 imigran dan pada tahun 2012-2013 terdapat sebanyak 403 perahu dengan jumlah 25.173 imigran (Phillips & Spinks, Boat arrivals in Australia since 1976, 2011).

Tabel 1. Grafik Kedatangan Orang yang Tiba secara Ilegal dengan Perahu pada Tahun 1979-2013



Sumber: Parliament of Australian: Department of Parliamentary Services. Statistical Appendix updated 23 July 2013. Page 26.

Meskipun telah diterapkan beberapa kebijakan tersebut belum juga mampu untuk menangani persoalan peningkatan kedatangan para pencari suaka di Australia. Larangan dan sanksi keras yang diterapkan Australia sebagai negara tujuan seperti tidak diperdulikan. Hal ini terbukti dengan jumlah kapal ilegal imigran ilegal dari Timur Tengah ke Australia melalui Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Hingga saat ini, imigran ilegal dari negara Timur Tengah seperti Iran, Afganistan dan Pakistan masih terus mengalir (www.nationals.org.au, 2013).

Tabel 2. Labor's Record: 48.300 Kapal Ilegal yang Tiba sejak Tahun 2007



Sumber : *The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa selama satu setengah tahun terakhir, tidak kurang dari 19 ribu imigran ilegal tiba di Australia. Oleh karena itu, perdana menteri terpilih tahun 2013 lalu juga berupaya untuk mengatasi masalah ini. Dia adalah perdana menteri Tony Abbott yang menjabat mulai menjabat pada tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2015. Tony Abbott tidak dapat menyelesaikan fenomena manusia perahu begitu saja. Hal ini dikarenakan masalah imigran ilegal telah terjadi sejak beberapa dekade lalu akibat berbagai kejadian di negara lain seperti konflik perang, korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ataupun kemiskinan. Sehingga pemerintahan Tony Abbott harus membuat kebijakan atau *policy* guna mengatasi *illegal immigrant* tersebut.

Kerangka Dasar Teori

Dalam artikel ini kerangka dasar teori yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah Teori Pembuatan-Keputusan (*Decision Making Theory*) oleh William D. Coplin dan Konsep Kepentingan Nasional (*National Interest*) oleh Hans J. Morgenthau.

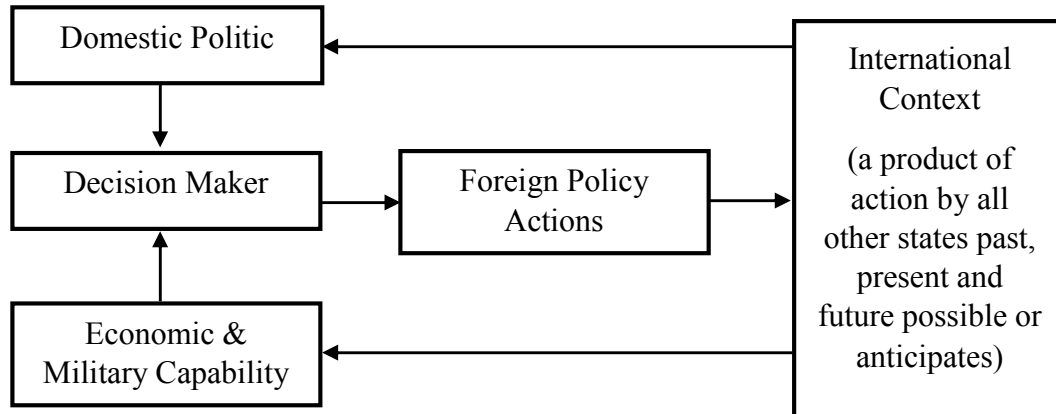
Konsep kepentingan nasional merupakan hasil telaah para pemikir realisme. Hans. J Morgenthau menyatakan bahwa : “Politik itu sendiri pada hakikatnya adalah perjuangan untuk mencapai kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara dan menunjukkan kekuasaan menentukan teknik aksi politik” (Jackson & Sorensen, 2005, hal. 100). Morgenthau yakin bahwa setiap pemimpin negara merasa wajib melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan mengacu pada petunjuk yang digariskan pada kepentingan nasional dan pemimpin akan disalahkan apabila gagal mencapainya.

Sebagai negara maju, Australia pastinya mempunyai kepentingan nasional yang ditujukan untuk mensejahterakan perekonomian, pendidikan, dan keamanan di dalam negaranya. Pastinya terdapat berbagai *national interest* dalam upaya mengatasi imigran ilegal. Oleh karena itu konsep kepentingan nasional tidak dapat dipisahkan dari kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh Australia di bawah pemerintahan Tony Abbott.

William D. Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara diambil. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; *pertama*, kondisi politik dalam negeri, *kedua* adalah kapabilitas ekonomi dan militer dan yang terakhir adalah konteks internasional,

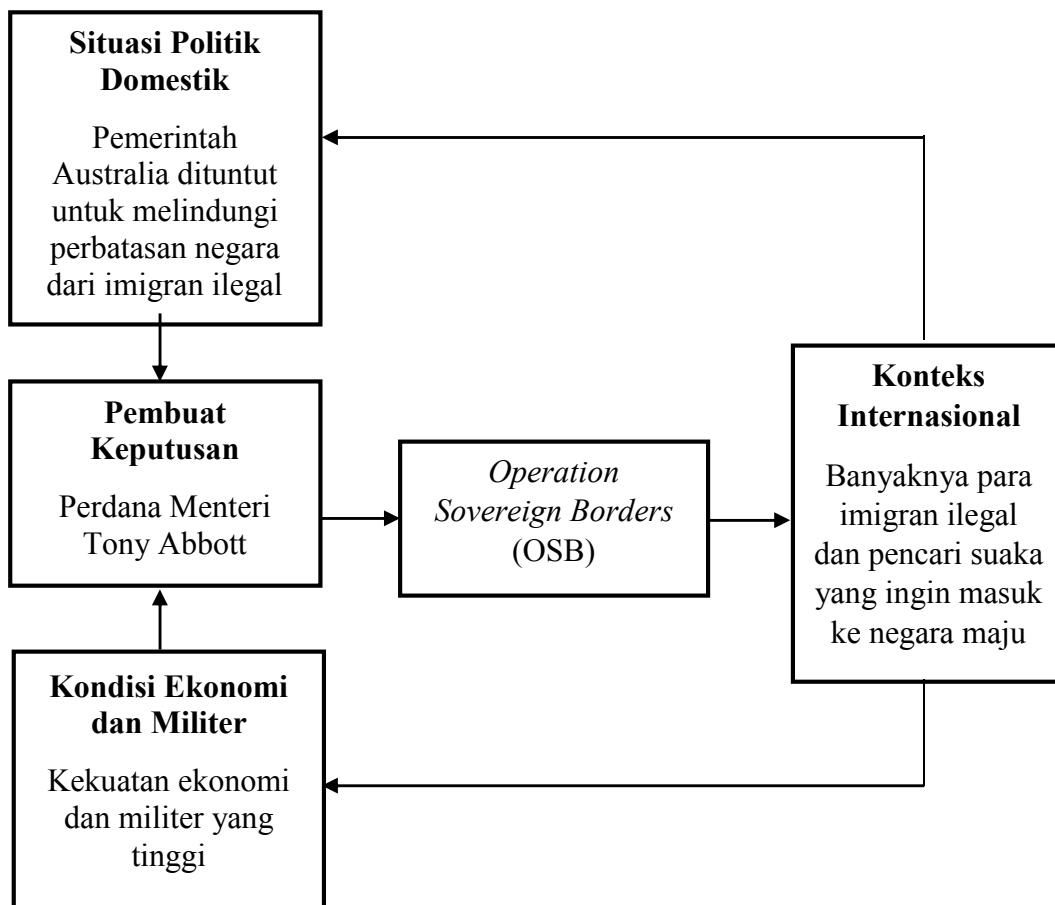
yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Coplin, 2003, hal. 30). Berikut adalah model teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri :

Tabel 3. Bagan Model Teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri menurut William D. Coplin



Sumber : Wiliam de Coplin, "Introductions to International Politic : Teoritcal Overview"

Tabel 4. Variabel Yang Menjelaskan Situasi Dalam Negeri Dan Internasional



*Sumber : Aplikasi variable Wiliam de Coplin, "Introductions to International Politic :
Teoritical Overview"*

PEMBAHASAN

Selama pemilu 2013, Tony Abbott berkampanye mengenai kebijakan bahwa pemerintah Koalisi akan "*stop the boats*" dan akan meluncurkan *Operation Sovereign Borders*, menggabungkan sumber daya dari beberapa badan pemerintah di bawah kontrol langsung dari Jenderal Angus Campbell yang mana dipromosikan dan diangkat oleh Tony Abbott untuk mengawasi Operasi tersebut (Brissenden, 2013).

Operation Sovereign Borders (OSB) adalah operasi penjagaan keamanan perbatasan yang dipimpin oleh militer, serta didukung dan dibantu oleh berbagai lembaga pemerintah federal (www.border.gov.au, *Operation Sovereign Borders*, 2016). Diluncurkan pada 18 September 2013 pemerintahan koalisi di bawah PM Tony Abbott membentuk militer sebagai respons untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia dan mencegah orang-orang yang membahayakan nyawa mereka di lautan dan menjaga integritas program migrasi Australia (www.border.gov.au, 2015). Pemerintah Koalisi memperlakukan krisis perlindungan perbatasan sebagai darurat nasional dan mengatasi masalah pencari suaka dengan fokus bahwa ini adalah sebuah tuntutan darurat.

Dalam *Operation Sovereign Borders* telah dibentuk Gugus Tugas Lembaga Bersama atau *Joint Agency Task Force* (JATF) untuk memastikan upaya seluruh pemerintah untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. JATF ini didukung oleh tiga kelompok tugas operasional (www.border.gov.au, 2016) :

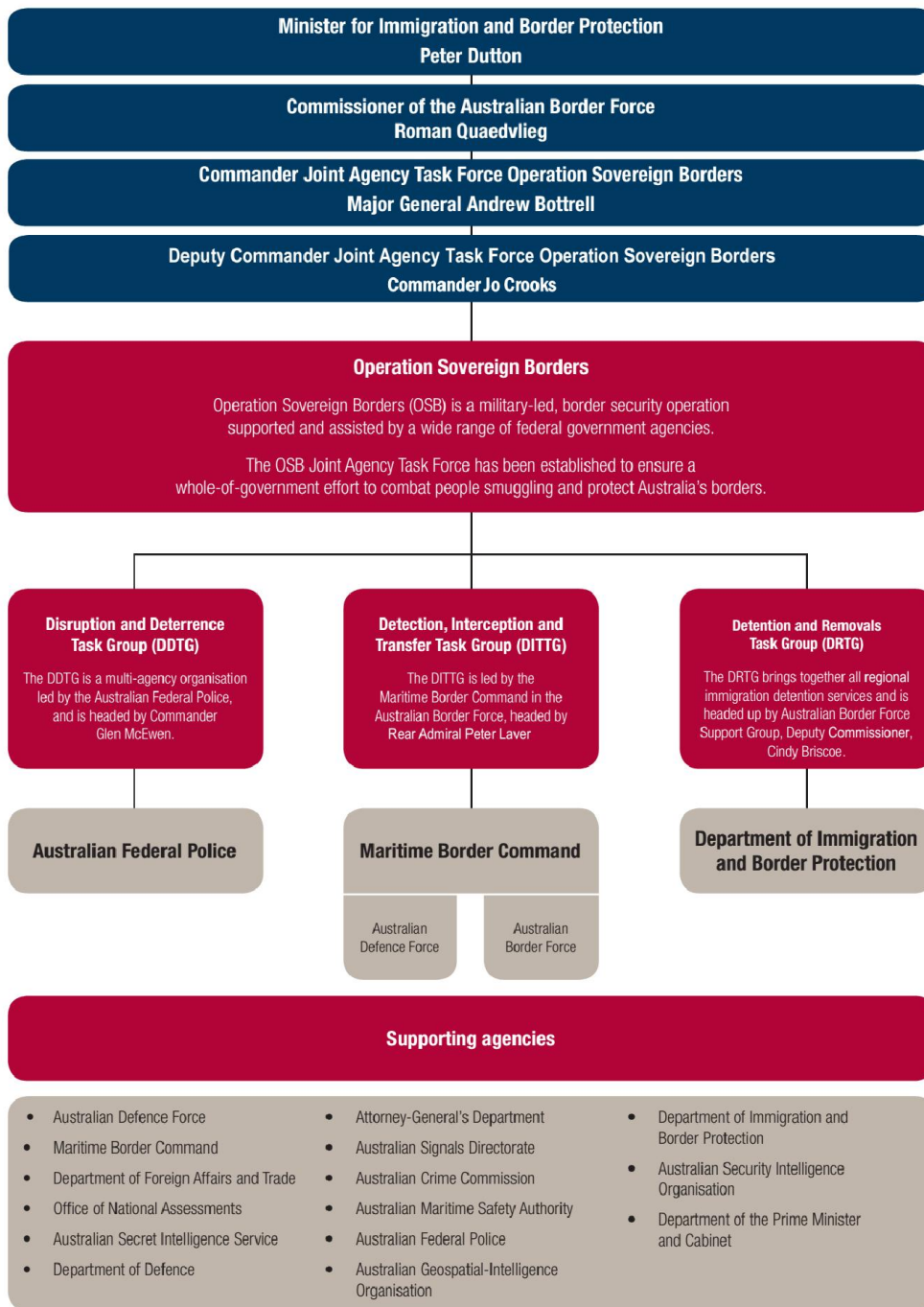
1. Kelompok Tugas Gangguan dan Pencegahan yang dipimpin oleh Polisi Federal Australia.
2. Kelompok Tugas Deteksi, *Interception* dan Transfer yang dipimpin oleh Bea Cukai Australia dan Layanan Perlindungan Perbatasan yang meliputi Komando Perlindungan Perbatasan.
3. Kelompok Tugas Penahanan Lepas Pantai dan Pengembalian yang dipimpin oleh Departemen Perlindungan Imigrasi dan Perbatasan (DIBP).

Di bawah *Operation Sovereign Borders*, Tony Abbott melakukan tindakan bersama Menteri Imigrasi Scott Morrison dengan membuat Operasi Kedaulatan Perbatasan Negara, yang dipimpin Angus Campbell. Angus Campbell adalah seorang komandan militer senior bintang 3. Komandan akan melaporkan langsung kepada Menteri Imigrasi, yang akan memiliki

tanggung jawab porto folio untuk Operasi Sovereign Borders. Operasi ini bertujuan untuk mengamankan batas negara untuk menghentikan perahu-perahu penyelundup, mencegah orang-orang yang membahayakan nyawa mereka di lautan, dan menjaga integritas program imigrasi Australia.

Kebijakan Tony Abbott untuk mengembalikan kapal-kapal penyelundup tidak berubah seperti yang telah diputuskan oleh *High Court of Australia* atau Pengadilan Tinggi Australia (www.border.gov.au, 2013). Pemerintah Australia belum dan tidak akan melunakkan aturan-aturan perlindungan batas negaranya yang ketat. Tony Abbott tetap berkomitmen untuk menekan penyelundupan manusia dan mencegah hilangnya nyawa manusia di laut. Australia akan terus mendeteksi, mencegah dan mengembalikan kapal-kapal yang memasuki perairan secara ilegal.

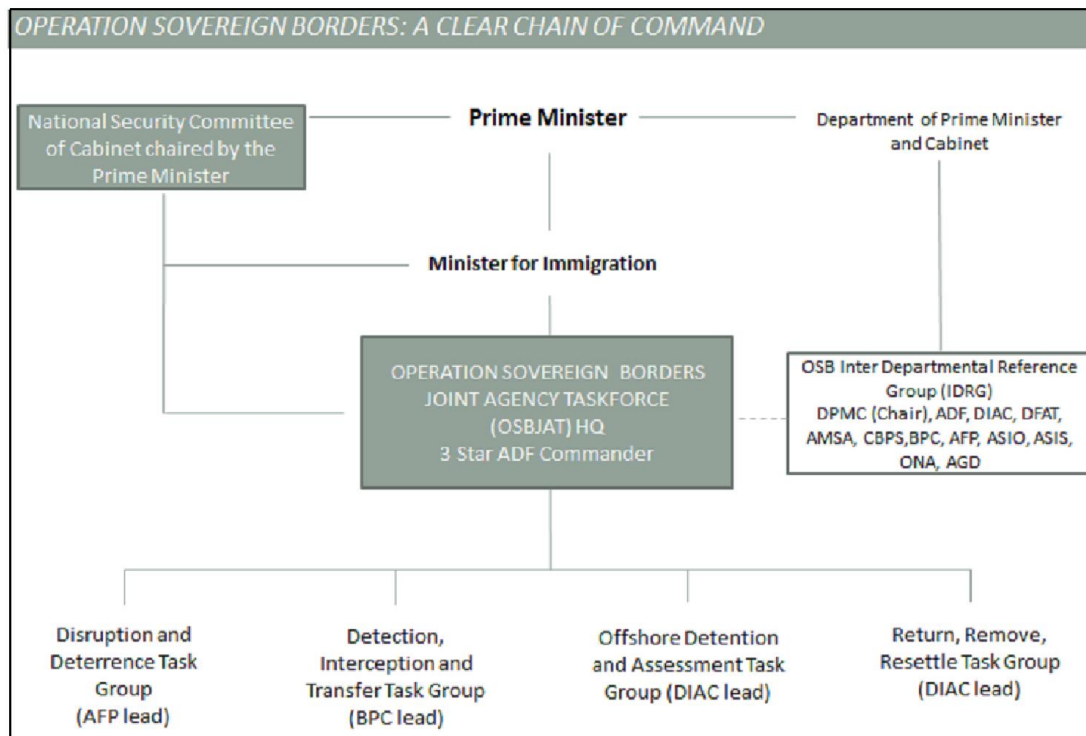
Struktur Organisasi *Operation Sovereign Borders*



Sumber : Operation Sovereign Borders The first six months

Berdasarkan tabel diatas The OSB Joint Agency Task Force (JATF) telah dibentuk untuk memastikan seluruh upaya pemerintah untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Dalam pelaksanaan Operasi Kedaulatan Tony Abbott menjadikan Menteri Imigrasi Australia sebagai penanggung jawab dan Angkatan Laut Australia sebagai pelaksana pengamanan perbatasan laut. Total ada 15 lembaga yang mendukung kebijakan tersebut.

Rantai Komando Operation Sovereign Borders



Sumber : *The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy*

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui rantai komando dari kebijakan Tony Abbott. Angkatan Pertahanan Australia akan bertugas untuk memimpin pelaksanaan *Operation Sovereign Borders* dan merancang, meningkatkan, menyebarkan, dan mendukung "*Sovereign Borders Joint Agency Taskforce*". Kepala Angkatan Pertahanan akan memberikan komando dan kontrol langsung yang baik untuk markas *Operation Sovereign Borders Joint Agency Taskforce* dan merekomendasikan Jenderal bintang 3 untuk memimpin operasi. Komandan akan melaporkan langsung kepada Menteri Imigrasi yang bertanggung jawab membuat laporan porto folio dan melaporkannya kepada Perdana Menteri (www.liberal.org.au, 2013).

Biaya atau *cost* yang diperlukan guna menjalankan operasi tersebut diperkirakan menghabiskan 10 juta dollar untuk membangun markas dari *The Operation Sovereign Borders Joint Agency Taskforce* (www.liberal.org.au, 2013). Jumlah tersebut belum termasuk biaya sumber daya sekunder dari instansi atau badan pendukung. Kekuatan ekonomi Australia yang kuat tentunya tidak menjadi masalah bila nantinya operasi tersebut membutuhkan dana yang lebih. Dana khusus untuk Operasi Kedaulatan Perbatasan akan menjadi subjek kebijakan yang terpisah dari subjek lain sehingga anggarannya tidak akan terganggu oleh kepentingan nasional yang lain. Selanjutnya dana tersebut akan dialokasikan melalui Kepala Angkatan Pertahanan.

Setiap akhir bulan Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia melalui website resminya selalu mempublikasikan hasil dari operasi tersebut. Sehingga publik dapat secara langsung memantau kinerja dari Tony Abbott dalam mengatasi *illegal immigrant*.

Data Hasil Pelaksanaan *Operation Sovereign Borders*

Bulan	Jumlah Imigran	Jumlah Kapal
September 2013	205	5
Oktober 2013	339	5
November 2013	207	5
Desember 2013	355	7
Januari 2014	1	0
Februari 2014	1	0
Maret 2014	0	0
April 2014	0	0
Mei 2014	0	0
Juni 2014	0	0
Juli 2014	157	1
Agustus 2014	0	0
September 2014	0	0
Oktober 2014	0	0
November 2014	0	0
Desember 2014	4	0
Januari 2015	0	0
Februari 2015	0	0
Maret 2015	0	0
April 2015	0	0
Mei 2015	0	0
Juni 2015	0	0

Juli 2015	0	0
Agustus 2015	0	0
TOTAL	1269	23

Sumber : Newsroom Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia

Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama Tony Abbott menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, imigran ilegal yang masuk sejumlah 1269 orang dengan 23 kapal (newsroom.border.gov.au, 2015). Jumlah ini sangat jauh berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Bila pada periode 2012-2013 jumlah imigran ilegal sebanyak 25.596 orang, maka kali ini pemerintah Tony Abbott bisa dibilang berhasil dalam kebijakan *Operation Sovereign Borders* karena turun sebanyak 95% dari periode sebelumnya.

Kementerian Imigrasi Australia mengatakan sepanjang bulan Desember 2013, jumlah pencari suaka yang tiba dengan kapal di Australia mencapai 355 orang. Ini merupakan jumlah kedatangan di bulan Desember terendah dalam 5 tahun terakhir. Kapal-kapal pencari suaka itu tidak hanya berhasil dihentikan kedatangannya, tetapi mereka memang benar-benar berhenti berdatangan ke Australia. Itu menunjukkan kebijakan yang dijalankan memang kebijakan yang tepat, dan itu menghasilkan dampak yang diharapkan di perbatasan Australia, sebagaimana janji pemerintah koalisi (abc.net.au, 2013).

Data di atas juga membuktikan bahwa secara signifikan operasi ini memberikan rasa takut kepada para pencari suaka yang akan datang. Terbukti dengan tidak adanya imigran ilegal yang masuk atau mendarat di Australia pada bulan Maret 2014 hingga Juni 2014. Itu adalah masa kekosongan terpanjang dalam lima tahun terakhir. Ditambah lagi dari Januari 2015 hingga berakhirnya masa pemerintahan Tony Abbott, tidak ada satu pun *illegal immigrant* yang berani masuk ke wilayah Australia karena ketatnya pelaksanaan operasi tersebut.

Semua pihak yang terkait dalam *Operation Sovereign Borders* termasuk Menteri Imigrasi Scott Morrison mengakui bahwa kebijakan Tony Abbott benar-benar berhasil dalam mengatasi masalah imigran ilegal (radioaustralia.net.au, 2015). Seperti data yang telah penulis paparkan bahwa jumlah pencari mulai meningkat pada tahun 2009 hingga pertengahan 2013 dan akhirnya turun drastis setelah adanya kebijakan Tony Abbott yang didukung oleh berbagai instansi atau badan resmi Australia. Para imigran ilegal yang tertangkap kemudian ada yang dipulangkan ke negara asal dan ada pula yang ditahan di Pulau Nauru serta Pulau Manus.

Respon Dunia Internasional

Pelaksanaan Operasi Kedaulatan Perbatasan mendapat respons negatif dari berbagai pihak, antara lain Indonesia dan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Bahkan, PBB pun juga mengecam melalui Komisioner PBB untuk urusan Hak Asasi Manusia. Ketegangan mulai terjadi antara pihak Australia dengan Indonesia ketika Angkatan Laut Australia telah memasuki secara ilegal perairan Indonesia dalam rangka mendorong kembali kapal-kapal pencari suaka ke wilayah Indonesia (www.mediawarga.info, 2014). Aksi sepihak Australia tersebut langsung direspons pemerintah Indonesia dengan mengirimkan Kapal Perang ke perbatasan Australia yang membuat hubungan Indonesia - Australia bisa dikatakan dalam titik nadir.

Bersamaan dengan pengakuan itu pula, atas nama Pemerintah Australia, Morrison meminta maaf tanpa syarat kepada Pemerintah Indonesia dan berjanji tidak akan mengulangi kejadian serupa ke depannya. Tetapi, sekaligus pula menegaskan bahwa Australia tidak akan menghentikan operasi ini dan tetap akan melanjutkan kebijakan pemulangan kapal.

Tidak hanya masalah ketegangan dengan Indonesia, Australia juga dituding oleh PBB karena telah melanggar HAM para pencari suaka. Laporan terbaru PBB menyebutkan bahwa Australia secara sistematis telah melanggar Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan atas perlakuan buruk mereka terhadap para imigran asing pencari suaka, terutama anak-anak, di pusat detensi Pulau Manus, Papua Nugini. Diberitakan *CNN*, laporan pada Dewan HAM PBB ini disampaikan oleh pelapor khusus untuk penyiksaan, Juan Mendez, atas penyelidikan penyiksaan dan pelecehan di 68 negara, salah satunya Australia (Armandhanu, 2015).

Kasus ini menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir setelah media *ABC Australia* melaporkan bahwa 10 pencari suaka memerlukan perawatan medis. Dalam insiden ini, sebanyak tujuh orang disebutkan mengalami luka bakar di tangan, setelah mereka diperintahkan untuk memegang pipa panas pada mesin kapal (www.dw.com, 2014).

Walaupun sudah ditegur dan dikecam oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), pihak Australia tidak akan mundur dari kebijakan Operasi Kedaulatan Perbatasan. Dalam hampir lima tahun terakhir, jumlah kedatangan pencari suaka telah turun ke level terendah. Demikian klaim Australia. Pemerintahan di Canberra tidak akan ada kata mundur dari operasi tersebut. Karena dengan kebijakan inilah akhirnya Australia bisa mencegah masuknya *illegal immigrant* ke perbatasan negaranya.

PENUTUP

Implementasi kebijakan OSB di lapangan di antaranya adalah dengan mencegat atau memulangkan kembali kapal-kapal yang membawa pencari suaka ke negara embarkasi. Kebijakan antara Australia melalui *Operation Sovereign Borders* dalam menghadapi ancaman imigrasi ilegal dan penyelundupan imigran berhasil dengan baik yang ditunjukkan dengan penurunan kedatangan imigran ilegal yang sangat signifikan. Bahkan, kebijakan Tony Abbott tersebut lebih efektif dari pada kebijakan-kebijakan pada pemerintahan sebelumnya. Terbukti dengan data kedatangan imigran ilegal yang penulis teliti pada bab sebelumnya. Operasi Kedaulatan Perbatasan sukses menurunkan jumlah *illegal immigrant* hingga 95 persen, yang mana sebelumnya sebanyak 25.596 dan setelah kebijakan tersebut dilaksanakan jumlah imigran ilegal hanya sebanyak 1.269 orang selama 2 tahun Tony Abbot menjabat. Bahkan pada 8 bulan terakhir sebelum Tony Abbott digantikan, tidak ada sama sekali imigran ilegal yang mencoba masuk ke wilayah perbatasan Australia. Bukti-bukti di atas membuktikan bahwa *Operation Sovereign Borders* efektif dalam mengatasi masalah *illegal immigrant* yang selama ini terjadi di Australia. Walaupun dalam pelaksanaannya tersebut Operasi Kedaulatan Perbatasan mendapat respon negatif dari berbagai pihak, antara lain Indonesia dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

BIBLIOGRAFI

Buku:

- Coplin, W. D. (2003). *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2005). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Morgenthau, H. J. (2010). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Website:

- abc.net.au. (2013, Desember 28). *Kedatangan Pencari Suaka ke Australia Turun 87 Persen*. Dipetik Maret 24, 2016, dari Kompas Internasional: <http://internasional.kompas.com/read/2013/12/28/0934442/Kedatangan.Pencari.Suaka.ke.Australia.Turun.87.Persen>
- Armandhanu, D. (2015, Maret 9). *PBB Sebut Australia Siksa Imigran Asing, Abbott Murka*. Dipetik Maret 24, 2016, dari CNN Indonesia: <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150309165551-113-37802/pbb-sebut-australia-siksa-imigran-asing-abbott-murka/>
- Brissenden, M. (2013, September 18). *Tony Abbott appoints Angus Campbell to lead Operation Sovereign Borders policy*. Dipetik Maret 23, 2016, dari ABC News (Australian Broadcasting Corporation): <http://www.abc.net.au/news/2013-09-17/angus-campbell-to-oversee-abbotts-border-protection-plan/4963732>
- newsroom.border.gov.au. (2015). *Operation Sovereign Borders*. Dipetik Maret 24, 2016, dari The Australian Department of Immigration and Border Protection Service Newsroom: <http://newsroom.border.gov.au/channels/Operation-Sovereign-Borders>
- Phillips, J., & Spinks, H. (2011, Januari 5). *Boat arrivals in Australia since 1976*. Dipetik Desember 26, 2015, dari Parliament of Australia: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1314/BoatArrivals
- radioaustralia.net.au. (2015, Januari 25). *Tidak Kapal Pencari Suaka Yang Masuk Dalam 36 Hari Terakhir*. Dipetik Maret 24, 2016, dari Tribunnews: <http://m.tribunnews.com/internasional/2014/01/25/tidak-kapal-pencari-suaka-yang-masuk-dalam-36-hari-terakhir>
- worldaudit.org. (2015). *Australia: Profil Demokrasi Audit Dunia*. Dipetik Desember 25, 2015, dari World Audit: <http://www.worldaudit.org/countries/australia.htm>
- www.border.gov.au. (2013). *Counter people smuggling communication*. Dipetik Maret 23, 2016, dari Australian Government: Department of Immigration and Border Protection: <https://www.border.gov.au/about/operation-sovereign-borders/counter-people-smuggling-communication/bahasa-indonesia-bahasa/video-transcript>

- www.border.gov.au. (2015, September). *Lembar Fakta Operasi Kedaulatan Perbatasan*. Dipetik Maret 23, 2016, dari Australian Government: Department of Immigration and Border Protection:
<https://www.border.gov.au/OperationSovereignBorders/Documents/fact-sheet-Bahasa.pdf>
- www.border.gov.au. (2016). *Operation Sovereign Borders*. Dipetik Maret 23, 2016, dari Australian Government: Department of Immigration and Border Protection:
<http://www.border.gov.au/about/operation-sovereign-borders>
- www.dw.com. (2014, Januari 24). *Australia Tak Akan Mundur Dari Operasi Kedaulatannya*. Dipetik Maret 24, 2016, dari Deutsche Welle: <http://www.dw.com/id/australia-tak-akan-mundur-dari-operasi-kedaulatannya/a-17384731>
- www.immi.gov.au. (2015). *Visa, Immigration, and Refugees*. Dipetik Desember 25, 2015, dari Department of Immigration and Citizenship:
<http://www.immi.gov.au/allforms/bridging.htm>
- www.liberal.org.au. (2013, Juli 26). *Operation Sovereign Borders*. Dipetik Maret 23, 2016, dari Liberal Party of Australia: <http://www.liberal.org.au/latest-news/2013/07/26/operation-sovereign-borders>
- www.mediawarga.info. (2014, Januari). *Operasi Kedaulatan Perbatasan Australia Lecehkan Kedaulatan Indonesia*. Dipetik Maret 24, 2016, dari Media Warga:
<http://www.mediawarga.info/2014/01/operasi-kedaulatan-perbatasan-australia.html>
- www.nationals.org.au. (2013). *The Coalition's Operation Sovereign Borders Policy*. Dipetik Desember 25, 2015, dari The Nationals:
<http://nationals.org.au/Portals/0/2013/policy/The%20Coalition%E2%80%99s%20Operation%20Sovereign%20Borders%20Policy.pdf>